

## **BAB II**

### **SEJARAH PARTAI MUSLIMIN INDONESIA (PARMUSI)**

#### **A. Latar Belakang Berdirinya Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI)**

Sebelum melihat lebih dalam sejarah Partai Muslimin Indonesia dalam proses kelahiran dan perjuangannya pada masa Orde Baru. Perlu kiranya untuk menguraikan sekilas tentang pembubaran Partai Masyumi pada tahun 1960 M oleh pemerintah Soekarno. Karena, jika memahami jiwa dan semangat perjuangan yang terkandung di dalam piagam pembentukan Partai Muslimin Indonesia maupun isi dari mukadimah anggaran dasar partai, terlihatlah latar belakang politik dan sejarahnya. Oleh sebab itu, PARMUSI bukanlah partai ciptaan baru sebagai wadah. Memang benar, ia adalah wadah yang baru, akan tetapi, ide yang menjiwainya, cita-cita yang dikandungnya dan moral perjuangannya sama sekali tidak baru<sup>17</sup>. Dengan demikian pembubaran Masyumi yang dianggap merampas hak-hak warga negara dalam berkumpul dan berserikat menjadi cikal bakal lahirnya PARMUSI di masa kepemimpinan Soeharto Orde Baru.<sup>18</sup>

Jika melihat latar belakang sejarah untuk mencari penjelasan mengapa Masyumi mengalami nasib sial dan terpelanting dalam sejarah panggung modern Indonesia, kita dapat menelusuri ketegangan psiko-politik antara pemimpin-pemimpin Masyumi, khususnya Mohammad Natsir dengan Soekarno. Pada tahun

---

<sup>17</sup>Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 184

<sup>18</sup>Sholichin Salam, *Sedjarah Partai Muslimin Indonesai*, (Jakarta: Lembaga Penyelidikan Islam, 1970). h. 9

1950 M, adalah puncak bulan madu Presiden Soekarno dengan Mohammad Natsir. Kedekatan Soekarno dengan Mohammad Natsir ditunjukkan ketika Mohammad Natsir sering diundang untuk sarapan pagi di istana. Selain itu, selama ibukota di Yogyakarta (1946 M -1948 M), hampir seluruh pidato Soekarno tentang 17 Agustus dalam rentang tahun tersebut, diserahkan kepada Mohammad Natsir untuk menyusunnya. Sungguh terlihat sangat erat hubungan antar keduanya, bahkan apabila kondisi politik semakin menghangat dalam menghadapi Belanda, yang diajak keluar negeri adalah Mohammad Natsir.

Mohammad Natsir semakin disukai oleh Soekarno, ketika berhasil dalam memelopori pengajuan mosi dalam parlemen untuk membentuk suatu negara kesatuan dengan melebur semua negara bagian yang diciptakan oleh Belanda pada tahun 1950 yang kita kenal dengan sebutan Mosi Integral Mohammad Natsir.<sup>19</sup> Bukti dari sikap suka ini kemudian Soekarno menunjuk Mohammad Natsir untuk menjadi formatur kabinet dan sekaligus menjadi Perdana Menteri pertama dari negara kesatuan, sekalipun Partai Nasionalis Indonesia (PNI) tidak masuk dalam kabinet. Soekarno bahkan berkata: teruskan sekalipun PNI tidak ikut serta.<sup>20</sup>

Itulah fakta sejarah lukisan manis tentang bulan madu antara Soekarno dengan Mohammad Natsir selama tahun-tahun berat yang sedang dihadapi Indonesia. Namun, sejarah dunia sering memberi tahu kepada kita, bahwa teman dalam

---

<sup>19</sup>Gungun Karya Adilaga, *Simpul Sejarah: Mengikat Makna Perjuangan Umat Islam Bangsa Indonesia*, (Argopuros Pena Aksara, 2017), h. 81

<sup>20</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) h. 70-71

perjuangan tidak selalu langgeng. Perbedaan situasi dapat mengubah suasana persaudaraan yang tadinya intim menjadi tegang dan panas. Apalagi bila perbedaan pandangan antara yang bersangkutan dalam menghadapi situasi yang sedang berubah telah mengalami gesekan-gesekan tajam. Demikianlah hubungan erat yang selama ini terjalin antara Soekarno dan Natsir, mengalami perubahan drastis sejak tahun 1951. Menurut Natsir, sebab pokok gesekan ini adalah sikap yang berbeda dalam menghadapi masalah Irian Barat. Suatu bisul politik antar Indonesia dan Belanda yang belum terselesaikan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir 1949. Perbedaan sikap antara kabinet Natsir dan Soekarno dalam masalah Irian Barat inilah yang kemudian menjadi titik awal ketidakharmonisan antara kedua figur republik itu.<sup>21</sup> Yang kemudian ketidakharmonisan tersebut meletus ketika Soekarno memimpin dengan Demokrasi Terpimpinnya.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965 M), Presiden Soekarno mulai memerintah dengan sikap diktator (semaunnya). Karena itu, partai-partai yang tidak setuju dengan tindakan yang diambalnya, dianggap kontra revolusi dan dianggap menentang dirinya (Soekarno).<sup>22</sup> Salah satu diantaranya adalah partai Masyumi, sebagai partai oposisi kerap sekali menentang kebijakan-kebijakan pemerintah Soekarno, sehingga menimbulkan perpecahan di antara keduanya. Sekurang-kurangnya pada saat ketidakpercayaan Masyumi terhadap Soekarno meningkat. Masyumi dilihat oleh presiden pada tahun 1958 bersimpati dengan pemberontakan

---

<sup>21</sup>Peter Kasenda, *Bung Karno Panglima Revolusi*, (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2014), h. 189

<sup>22</sup>Nor Huda, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 91

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebaliknya, Soekarno dilihat Masyumi sebagai penguasa yang ingin menegakkan kediktatoran dan yang memberi angin kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).<sup>23</sup>

Tokoh-tokoh senior Masyumi seperti Mohammad Natsir, Boerhannoedin Harahap dan Sjafruddin Prawiranegara bersama-sama dengan Sumitro Djojohadikusumo, Muhammad Rasyid dari PSI,<sup>24</sup> Dewan Banteng dan panglima militer dari beberapa daerah, mereka membentuk dewan perjuangan dengan nama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diproklamasikan pada 15 Februari 1958 M. Sjafruddin Prawiranegara diamanahkan sebagai perdana menteri, Mohammad Natsir sebagai juru bicara dan Boerhannoedin Harahap sebagai Menteri Pertahanan dan Kehakiman. Sementara itu, Sumitro Djojohadikusumo menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Keberadaan PRRI adalah koreksi atas penyelewengan yang sudah menyelip di tubuh parlemen,<sup>25</sup> dengan alasan pemerintah RI di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda adalah pemerintah yang tidak sah, karena dibentuk oleh Soekarno dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan-aturan konstitusi yang berlaku.<sup>26</sup> Selain itu, masalah otonomi daerah dengan pembangunan yang tidak merata dan tidak terjadi kesinambungan pembangunan antara Jawa dan pulau di luar Jawa. Bagaimana tidak, kegiatan ekspor secara global terbesar adalah wilayah Sumatera dibandingkan Pulau Jawa. Sehingga, pemerintah pusat telah

---

<sup>23</sup>Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987) h. 50

<sup>24</sup>Nama-nama tersebut ditulis oleh Deliar Noer dalam bukunya yang berjudul *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987)

<sup>25</sup>Abraham Ilyas, *45 Kisah PRRI di Rumah Bunda: Tuan Sekata Celaka Bersilang*, (Lembaga Kekerabatan Datuk Soda, 2016), h. 70

<sup>26</sup>Tohir Luth, *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 52

melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap daerah tanpa memperdulikan kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan daerah luar Jawa. Hal ini semakin kompleks dengan keharmonisan pemerintah Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia.

Pada tanggal 22 Februari 1958, pemberontakan PRRI dimulai. Pemerintah mengambil sikap untuk menggerakkan operasi militer gabungan secara terbuka. Keputusan ini diambil disebabkan setelah berakhirnya ultimatum pemerintah pusat kepada PRRI untuk menyerahkan diri. Tidak seimbangny perlawanan yang diberikan oleh pasukan PRRI terhadap tentara pusat, maka perlawanan dilakukan dengan bergerilya. Pada akhirnya pada tanggal 28 Mei 1961 M, PRRI dapat ditaklukan.<sup>27</sup>

Atas dasar tersebut, Soekarno merujuk pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1959 yang menyebutkan salah satu kriteria pembubaran partai politik adalah sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya. Hal tersebut kemudian dituduhkan kepada Masyumi. karena pada awalnya Masyumi di bawah genggamannya Mohammad Natsir dan kelompoknya. Tampaknya, di mata Soekarno rumusannya adalah: Natsir=Masyumi dan Masyumi=Natsir. maka bila Natsir turut dalam pemberontakan daerah, berarti Masyumi juga terlibat.

---

<sup>27</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, *Dipaksa Kalah: Penguasa dan Aparat Negara Milik Siapa?*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 128

Pada kenyataannya Partai Masyumi dipaksa membubarkan diri karena dianggap oposisi dan menentang revolusi yang menurut Soekarno belum selesai. Soekarno juga menuduh bahwa Masyumi berada di belakang pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di daerah, seperti: Sumatra Barat, Aceh, Sulawesi, dan Kalimantan. Apalagi daerah-daerah yang memberontak tersebut merupakan kantong-kantong Masyumi. Ditambah pula tokoh-tokoh ulung Masyumi seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Boerhanoeddin Harahap ikut dalam pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.

Masyumi juga dianggap sebagai duri di dalam daging yang mengganggu “jalannya revolusi” dan harus dibubarkan. Padahal Masyumi adalah ujung tombak penegak demokrasi di Indonesia. Namun, Masyumi hendak dikuburkan oleh Soekarno melalui demokrasi terpimpinnya.<sup>28</sup> Dengan Keppres Nomor 200/1960, Soekarno mengambil sikap tegas untuk membungkam tokoh Masyumi. Banyak tokoh aktivis Masyumi, seperti Mohammad Natsir, Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), Ghazali Sjahlan, Boerhanoeddin Harahap, Mohammad Yunan Nasution, Prawoto Mangkusasmito, Isa Anshari, Engkin Zaenal Muttaqien dan Sjafruddin Perwiranegara, mendekam di dalam penjara tanpa proses hukum yang wajar akibat perlawanan terhadap Soekarno.

Sementara itu, kekuatan politik pada tahun 1965 didominasi oleh PKI dan ABRI. Kedua lembaga tersebut terlihat tidak harmonis. Keduanya berusaha

---

<sup>28</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, h. 75

mempengaruhi Soekarno dalam kegiatan politik. Ketegangan antar keduanya tidak dapat lagi terbendung, hingga akhirnya PKI melakukan pemberontakan untuk upaya kudeta, pemberontakan tersebut sering kita sebut G.30S.PKI.

Kegagalan dari pemberontakan PKI di Madiun ternyata membuat kegaduhan politik, banyak mahasiswa dan umat Islam melakukan protes dengan tuntutan PKI harus bubar. Kegaduhan tersebut berusaha diredam oleh Soekarno dengan membentuk 100 kabinet, dengan harapannya dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Akan tetapi, tidak berhasil. Sampai kekuasaan Soekarno berakhir. Soekarno lengser setelah menandatangani surat pada tanggal 11 Maret atau lebih populer disebut SUPERSEMAR, sehingga peralihan kekuasaan pun terjadi, dari kepemimpinan Soekarno ke Soeharto dari Orde Lama ke Orde Baru.

Orde Baru adalah rezim yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada tahun 1965-1998. Kelahiran Orde Baru bagaikan lampu hijau bagi tokoh-tokoh bekas Masyumi, setelah tokoh-tokoh yang menjadi tahanan politik dikeluarkan oleh Soeharto. Dengan dalih alasan untuk menjamin hak-hak sebagai warga negara. Atas dasar tersebut, muncullah ide gagasan untuk melakukan rehabilitasi Masyumi dengan mendirikan Badan Koordinasi Amal Muslimin yang pada akhirnya melahirkan sebuah partai politik yang bernama PARMUSI pada tahun 1968.

## **B. Berdirinya Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI)**

Setelah Masyumi dibubarkan dan kekuasaan Orde Lama lengser, ada tugas penting yang harus dilakukan oleh umat Islam dan bangsa Indonesia di awal Orde Baru. Salah satunya adalah bertekad untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Tugas penting itu adalah memulihkan hak-hak asasi warga negara yang bertahun-tahun diperkosa oleh rezim Orde Lama. Hak-hak tersebut adalah hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Di tahun 1968an, umat Islam menginginkan tampilnya kekuatan Islam Politik. Sejalan dengan perkembangan Orde Baru, umat Islam menyusun rencana untuk tampilnya Islam politik itu. Keputusan ini diambil bukanlah sesuatu keinginan yang didorong oleh kemauan perseorangan (sendiri), melainkan sebuah proses logis dari suatu peristiwa yang wadah penyaluran aspirasi politiknya yaitu Masyumi telah dibubarkan oleh rezim sebelumnya pada tahun 1960 M.

Tampilnya Partai Muslimin Indonesia sebagai partai Islam yang bersifat federasi bukanlah suatu kebetulan dalam sejarah yang tidak dilatarbelakangi kesadaran yang dalam dan panjang. Kelahiran PARMUSI dapat dikatakan sebagai suatu keharusan sejarah bagi dinamika politik umat Islam Indonesia. Sebab, secara kenyataan terdapat beberapa partai Islam yang sudah berdiri (ada). Namun faktanya, masih terdapat sekelompok golongan yang belum terwakili aspirasi politiknya. Partai-partai Islam yang ada seperti : NU, PSII, dan Perti belum mewadahi kalangan modernis, karena NU dan Perti berorientasi tradisional dan PSII berorientasi



modernis tetapi kurang dikenal.<sup>29</sup> Lahirnya PARMUSI merupakan hasil (embrio) dari Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM) yang didirikan pada bulan Desember 1965. Keanggotaannya terdiri dari kelompok sosial dan kelompok pendidikan Islam yang kebanyakan dari mereka dahulunya adalah anggota dari Masyumi. BKAM didirikan pada awalnya mempunyai dua tujuan. *Pertama*, tujuan yang bersifat sosial budaya. *Kedua*, bertujuan untuk memperbaiki politik pemerintah Soekarno. Akan tetapi, tujuan tersebut kemudian berubah. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh pembubaran Masyumi, sehingga upaya-upaya yang muncul dalam perkembangannya adalah untuk memulihkan nama baik Masyumi.<sup>30</sup>

Setelah usaha untuk rehabilitasi Masyumi menemui jalan buntu, maka dalam suatu sidang pertemuan BKAM dengan yang bertindak atas nama Panitia Rehabilitasi Masyumi pada tanggal 07 Mei 1967 telah mengambil keputusan. *Pertama*, untuk membentuk wadah politik umat Islam yang aspirasi politiknya belum tersalurkan dalam suatu wadah politik yang ada. *Kedua*, untuk mempersiapkan Punt 1, dan sidang memilih K.H. Faqih Usman untuk membentuk panitia persiapannya. Kemudian, K.H. Faqih Usman pada saat itu juga berhasil membentuk panitia persiapan pembentukan Partai Muslimin Indonesia yang lebih populer disebut dengan Panitia Tujuh. Sebab, jumlah panitia tersebut beranggotakan tujuh orang, masing-masing terdiri dari:

1. Ketua : K. H. Faqih Usman

---

<sup>29</sup>Sholichin Salam, *Sedjarah Partai Muslimin Indonesai*,h.10

<sup>30</sup>K.E, Ward, *The Fondation of The Partai Muslimin Indonesia*, (New York: Shotiest Asia Program Cornell University Itacha, 1970), h. 23

2. Wakil Ketu : Dr.Anwar Harjono, S.H
3. Sekretaris : Agus Sudono
4. Anggota : Nj. RABS Syamsuridjal
5. Anggota : H. Marzuki Jatim
6. Anggota : H. Hasan Basri
7. Anggota : Engkin Zaenal Muttaqien.<sup>31</sup>

Setelah terbentuknya “Panitia Tujuh” pada 7 Mei 1967 M, maka terdapat tanggung jawab yang besar yang harus diselesaikan oleh K.H. Fakhri Usman dan kawan-kawan. Tanggung jawab tersebut harus ia perjuangkan semaksimal mungkin dalam mewujudkan harapan dari berbagai kalangan yang menginginkan aspirasi politiknya segera tertampung dalam sebuah wadah yaitu partai politik.

Pada tanggal 11-19 Mei 1967,<sup>32</sup> sebagai langkah awal dari kerja “Panitia Tujuh” adalah menentukan sebuah nama untuk partai yang akan didirikan dan membahas mengenai program partai, Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan calon-calon pimpinan partai. Namun, permasalahan yang timbul terdapat pada penentuan sebuah nama, ada dua usulan nama. *Pertama*, ada yang mengusulkan nama Partai Islam Indonesia (PII) diusulkan oleh Muhammad Hatta. *Kedua*, diusulkan oleh K.H. Fakhri Usman dengan nama Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI). Masalah usulan nama tersebut diperdebatkan dalam rapat, hingga akhirnya nama Partai

---

<sup>31</sup>Sholichin Salam, *Sedjarah Partai Muslimin Indonesai*, h. 15

<sup>32</sup>Tercatat bahwa Panitia Tujuh mengadakan rapat dalam upaya memperjuangkan kelahiran PARMUSI sebanyak 16 kali. Pada tanggal 11 Mei merupakan rapat pertama dari Panitia 7, Lihat bukunya Sholichin Salam, *Sedjarah Partai Muslimin Indonesai*, (Djakarta: Lembaga penyelidikan Islam, 1970). h. 33-39

Muslimin Indonesia terpilih secara aklamasi sebagai nama dari partai baru yang akan didirikan.

Pembahasan mengenai AD/ART PARMUSI sampai saat ini belum ditemukan sumber data sebagai referensi. Akan tetapi, dalam buku Sholichin Salam dijelaskan bahwa PARMUSI sebagai Partai Politik yang berazaskan Islam, dengan tujuan bersama-sama dengan semua golongan warga negara yang ber-ketuhanan yang maha esa menegakkan dan membangun Negara Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah. Terlepas dari masalah AD/ART, “Panitia Tujuh” kembali berupaya pada tanggal 20 Juni 1967, mengirimkan sebuah surat resmi kepada pemerintah dengan maksud: memperkenalkan diri dan juga berisi pernyataan hasrat umat untuk membentuk suatu wadah politik baru yang diberi nama Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, pada tanggal 25 Juli 1967 pemerintah mengadakan pertemuan pertamanya dan pertemuan keduanya pada tanggal 12 Agustus 1967 antara “Panitia Tujuh” dengan wakil-wakil pemerintah. Dari pihak pemerintah diwakili oleh Letjen. Basuki Rachmat, Mayjen. Alamsyah, dan Brigjen. Sunarso bertempat di Jl. Imam Bonjol 9, Jakarta.

Perkembangan dari kinerja “Panitia Tujuh” semakin terlihat setelah ormas-ormas pendukung pada tanggal 17 Agustus 1967 M menandatangani sebuah piagam yang mendukung berdirinya PARMUSI. Ormas-ormas pendukung tersebut adalah Muhammadiyah, Al-Djamiatul Waslijah, Gabungan Serikat-Serikat Buruh Indonesia (Gasbiindo), Persatuan Islam, Nahdlatul Wathan, Mathla’ul Anwar, Serikat Nelajan

Islam Indonesia (SNII), Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), Persatuan Ummat Islam (PUI), Al-Ittihadijah, Persatuan Organisasi-Organisasi Buruh Indonesia (PORBISI), Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al-Irsjad dan Wanita Islam serta didukung oleh tiga ormas lainnya, yaitu: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Majelis Seni Budaya Islam (Masbi).<sup>33</sup> Apalagi di dalam perundingan-perundingan antara staf pribadi Pd. Presiden dengan “Panitia Tujuh” telah terdapat kata sepakat, bahwa istilah “menggabungkan” di dalam piagam itu tidak berarti “peleburan” melainkan “penggabungan aktivitas politik”.

Sejauh ini, masalah-masalah internal yang timbul baik dalam “Panitia Tujuh” maupun ormas-ormas pendukung dapat diatasi dengan baik oleh K.H. Fakhri Usman dan kawan-kawannya. Namun, ketegangan mulai muncul ketika “Panitia Tujuh” mengirim surat resmi kepada pemerintah tertanggal 15 September 1967 M, terkait pembentukan PARMUSI berikut susunan personalia yang ternyata belum disetujui oleh pemerintah. Susunan kepengurusan tersebut terdiri dari Ketua Umum: Fakhri Usman; Ketua: A.D. Sjahrudin, Anwar Harjono, Djarnawi Hadikusumo, Hasan Basri, E.Z. Muttaqien; Sekjen: M. Sulaiman. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1967 diajukan kepengurusan yang sama. Dengan Ketua Umum K.H. Fakhri Usman yang lagi-lagi belum mendapat persetujuan dari pemerintah.<sup>34</sup> Atas hal tersebut,

---

<sup>33</sup>Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI), *Menuju Muktamar I* (Jakarta: 23-26 Agustus 2002) H. 4

<sup>34</sup>Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2011), h. 209

“Panitia Tujuh” segera mengadakan pertemuan-pertemuan baik dengan panitia sendiri maupun dengan pihak pemerintah. Tercatat pada 23 September 1967 M diadakan pertemuan untuk kesekian kali antara “Panitia Tujuh” dengan pemerintah yang diwakili oleh Letjen. Basuki Rachmat dan Mayjen. Alamsyah. Adapun permasalahan permasalahan yang dibahas adalah mengenai personalia atau calon-calon pimpinan partai.

Berbagai rintangan dan kesulitan yang harus dihadapi oleh “Panitia Tujuh” di dalam pembentukan partai baru tersebut, baik masalah internal maupun masalah eksternal. Meskipun demikian, masalah-masalah tersebut tidak mengendorkan jiwa dan semangat “Panitia Tujuh” dan ormas-ormas pendukung untuk berputus asa. Rapat maupun pertemuan-pertemuan dengan pemerintah tetap diadakan untuk menerobos segala kemacetan yang dihadapi. Memang sejak tanggal 31 Oktober 1967 M hingga awal tahun 1968 M adalah masa-masa yang tidak menentu dari partai yang akan didirikan itu. Ketidakpastian dari pemerintah membuat para pendukungnya cemas akan kelahiran partai tersebut. Sebab, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi terhadap partai itu, bisa disetujui atau bisa juga tidak. Atas masalah-masalah yang timbul pada awal-awal tahun 1968 M, maka “Panitia Pujuh” menyarankan kepada para pendukung untuk berperasaan optimis diawal bulan Januari ini. Sebab, bila dibulan Januari ini dimasuki dengan perasaan optimis, maka awal Februari 1968 akan sangat menentukan. Pada tanggal 5 Februari 1968 M hari Senin malam jam 20:00 Panitia Tujuh bersama-sama ormas-ormas pendukung pergi ke Istana Merdeka. sebagaimana telah diatur sebelumnya, pertemuan akan diadakan dua gelombang.

*Pertama*, dengan semua ormas yang sudah ada wakil-wakil di DPR-GR dan gelombang *kedua*, dengan semua ormas yang belum mempunyai wakil-wakil di DPR-GR dan “Panitia Tujuh”.<sup>35</sup>

Setelah upaya dari “Panitia Tujuh” menempuh jalan buntu, beberapa kali revisi personalia telah diupayakan dengan harapan segera diresmikan berdirinya PARMUSI secara sah. Calon pengurus pusat PARMUSI yang diajukan dengan Ketua Umum K.H. Fakhri Usman, ternyata menjadi sebuah hambatan yang berarti. Persetujuan antar kedua pihak, baik dari pemerintah dengan “Panitia Tujuh” ternyata belum menemukan titik temu. Di sisi lain “Panitia Tujuh” tidak memahami apa yang diinginkan dari pihak pemerintah sedangkan dari pemerintah terlihat malu-malu untuk mengatakannya. Pada akhirnya, “Panitia Tujuh” mengembalikan mandatnya kepada ormas-ormas pendukung pada tanggal 14 Februari 1968 M. Upaya “Panitia Tujuh” dalam memperjuangkan berdirinya partai tersebut dipandang sudah maksimal, adapun pemerintah belum menyetujuinya itu kembali kepada ormas-ormas pendukung.

Kepada ormas-ormas pendukung, Mayjen Alamsyah mengatakan bahwa yang membuat keberatan Soeharto untuk disetujuinya PARMUSI terdapat kurang lebih 5-10 orang yang harus dihilangkan dalam personalia kepengurusan. Adapun tokoh tersebut adalah K.H. Fakhri Usman, Anwar Harjono, A.D. Sjahrudin, H. Hasan Basri, Engkin Zainal Muttaqin, Mohammad Soleiman, Djamaluddin Dt.

---

<sup>35</sup>Sholichin Salam, *Sedjarah Partai Muslimin Indonesai*, h. 19

Singomangkuto, S.H, A.W. Soejoso, Drs. Sjarif Usman, dan Amelz.<sup>36</sup> Setelah ketemu permasalahan-permasalahan yang menghambat untuk kelahiran itu, “Panitia Pujuh” menyarankan untuk dikeluarkan saja dari susunan pimpinan. Setelah diadakan revisi terakhir oleh ormas-ormas pendukung dalam rapatnya tanggal 14 Februari 1968 M di Menteng Raya 58 Jakarta dan dengan berpegang pada saran yang pernah diberikan oleh pejabat Presiden Soeharto, maka dengan perantara Badan Koordinasi Amal Muslimin Pusat pada tanggal 16 Februari 1968 M dalam suratnya No. 0159/AM/Sek/68 telah mengajukan susunan pimpinan pusat Partai Muslimin Indonesia kepada pejabat Peresiden Soeharto. Adapun delegasi Amal Muslimin di bawah pimpinan Ibu RABS Sjamsurijal pada tanggal 19 Februari 1968 M diterima oleh pejabat Presiden Jendral Soeharto di kantor kabinet presiden di Merdeka Barat No. 15. Dalam pertemuan tersebut telah disampaikan susunan personalia dari pimpinan partai, PARMUSI. Susunan atas nama-nama yang sudah disepakati ternyata dapat diterima serta disetujui oleh Pd. Presiden. Adapun susunan nama-nama pengurus pusat sebagai berikut:

**SUSUNAN PIMPINAN PARTAI  
“PARTAI MUSLIMIN INDONESIA”  
(P.P. PARTAI MUSLIMIN)<sup>37</sup>**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>ORGANISASI</b>
1.	Ketua umum	H. Djarnawi Hadikusumo	Muhammadiyah
2.	Ketua	Agus Sudono	GASBINDO
3.	Ketua	Ir. H.M. Sanusi	Muhammadiyah

<sup>36</sup>Sholichin Salam, *Sedjarah Partai Muslimin Indonesai*, h. 24

<sup>37</sup>Sholichin Salam, *Sedjarah Partai Muslimin Indonesia*, h. 31

4.	Ketua	J. Naro S.H	Al Wasliyah
5.	Ketua	Daud Badaruddin	K.B.I.M
6.	Ketua	Chadidjah Razak	Wanita Islam
7.	Ketua	Drs. Ir. Omar Tusin	S.N.I.I
8.	Sekretaris Umum	Drs. Lukman Harun	Muhammadiyah
9.	Sekretaris	Drs. H. Amura	H.S.B.I.
10.	Sekretaris	Drs. Imron Kadir	Al Ittihadiyah
11.	Sekretaris	S. Siregar Pahu, B.A	Al Wasliyah
12.	Sekretaris	Anwar Bey	P.U.I
13.	Sekretaris	Said Sungkar	Mathlaul Anwar
14.	Sekretaris	M. Sjariki, S.H	Nahdlatul Wathan
15.	Sekretaris	Drs. Rafilus Ishak	PORBISI
16.	Sekretaris	Darussamin A.S	PGAIRI
17.	Anggota	Daris Tamin	Muhammadiyah
18.	Anggota	Drs. Djasman	Muhammadiyah
19.	Anggota	Nj. Rohana Z.A	Muhammadiyah
20.	Anggota	O.K. Abd. Aziz	Al Wasliyah
21.	Anggota	Ibrahim Usman	GASBIINDO
22.	Anggota	Maizir Achmadyn's	K.B.I.M
23.	Anggota	Nj. H. Mahmud Latjuba	Wanita Islam
24.	Anggota	Affandi Ridwan B.A	P.U.I.
25.	Anggota	Aisyah Aminny, S.H	H.S.B.I.
26.	Anggota	Faisal Basyir, S.H.	Al Israjid
27.	Anggota	K.H. Uwes Abubakar	Mathlaul Anwar
28.	Anggota	Drs. Ichsanudin Ilyas	PORBISI
29.	Anggota	Mohammad Said	Nahdlatul Wathan
30.	Anggota	Drs. Hasbullah	Muhammadiyah
31.	Anggota	Gazal	Al Ittihadiyah
32.	Anggota	H. Abdul Karim/ Oei Tjang Hien	P.I.T.I
33.	Anggota	H.M. Saleh Suaidy	MASBI
34.	Anggota	Ismail Hasan Metareum, S.H.	Unsur HMI
35.	Anggota	Ir. M. Alala	Unsur HMI

Pada akhirnya umat Islam mendapatkan apa yang selama ini diperjuangkan. Kelahiran PARMUSI yang disetujui pemerintah Soeharto pada tanggal 20 Februari 1968 M telah tercapai. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 1968 sebagai bukti



bahwa PARMUSI adalah partai politik yang sah dan dapat menikmati pesta demokrasi pada tahun-tahun selanjutnya.

Terkait dengan kelancaran dalam proses kelahiran PARMUSI, tentu tidak lepas dari bantuan moril dan materiil. Telah kita ketahui bersama bahwa Panitia Tujuh telah berupaya dalam memperjuangkan kelahiran PARMUSI. Lika-liku perjuangan yang ditempuh oleh Panitia Tujuh, tentu tidak boleh dipandang sebelah mata, walaupun toh pada akhirnya Panitia Tujuh pada tanggal 14 Februari 1968 M mengembalikan mandatnya kepada ormas-ormas pendukung setelah dianggap mentok. Upaya lain yang perlu diungkapkan pada tulisan ini adalah siapa yang memberikan sumbangan materiil terhadap kelahiran PARMUSI tersebut. Sebagai partai yang hendak berdiri, tentu sangat dibutuhkan sebuah dukungan baik moril maupun materiil. Berkaitan moril, kiranya cukup jelas dengan penjelasan sebelumnya tentang Upaya Panitia Tujuh, sedangkan terkait dukungan materiil yang berperan dalam hal ini ada dua. *Pertama*, dari tokoh-tokoh Masyumi seperti Mohammad Natsir. *Kedua*, saham dan peran GASBINDO, hal ini dibuktikan, bahwa persiapan teknis dari kegiatan Panitia Tujuh sejak tanggal 7 Mei 1967 M -20 Februari 1968 M berpusat di kantor GASBINDO Jl. Tanah Abang III/6 Jakarta. Bahkan bantuan dari GASBIINDO itu tidak saja terbatas pada dukungan moril dan politis, akan tetapi, seluruh biaya persiapan teknis dari Panitia Tujuh selama priode tersebut ditanggung oleh GASBIINDO.

Sebenarnya sikap pemerintah terhadap berdirinya PARMUSI telah menunjukkan watak asli pemerintah Orde Baru untuk kerjanya kedepan. Pemerintah Orde Baru ingin menunjukkan bahwa yang dilakukan adalah demi keberlangsungan negara dengan gayanya, maka kediktatoran inilah yang menjadi hambatan-hambatan bagi masa depan PARMUSI di tahun 1968-1998 M. Oleh sebab itu, PARMUSI mau tidak mau, siap tidak siap, harus mengikuti alur dengan tekanan-tekanan yang dibuat oleh Orde Baru agar bisa eksis di dalam mewujudkan tujuan partai.

Demikianlah proses kelahiran PARMUSI yang bermula sejak dibentuknya Panitia Tujuh pada tanggal 7 Mei 1967 M hingga Panitia Tujuh mengembalikan mandatnya pada tanggal 14 Februari 1968 M. Sekitar 10 bulan Panitia Tujuh berjuang dalam menjalankan tugas kewajiban yang diamanahkan oleh ormas-ormas pendukung kepadanya. Dengan mengikuti proses kelahiran PARMUSI, maka kita mengetahui bahwa PARMUSI ini tidaklah merupakan hasil impian semalam yang baik ataupun merupakan sesuatu barang hadiah yang diterima dengan cuma-cuma. Akan tetapi, kenyataan menyatakan, terbentuknya PARMUSI adalah merupakan hasil perjuangan umat melalui ormas-ormas pendukung yang dengan gigih berusaha menciptakan wadah politik yang baru sebagai tempat untuk menampung sebagian besar dari umat Islam di Indonesia belum tertampung aspirasi politiknya.

### **C. Perkembangan PARMUSI pada Tahun 1968-1973 M**

Pada perkembangan selanjutnya, PARMUSI belum genap satu tahun telah mengadakan muktamar pertamanya.<sup>38</sup> Muktamar tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-7 November 1968 M di Pendopo Kabupaten Malang. Muktamar PARMUSI sengaja ditentukan di bulan November, sebab bulan November sebagai bulan kelahiran partai Islam di Indonesia yang bernama Masyumi, didirikan 7 November 1945 M.<sup>39</sup> Pelaksanaan uktamar diamankan oleh Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) dengan baret kuning dan jaket coklat, sebagai ciri khas yang melekat. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan hubungan yang baik antara PARMUSI dengan Muhammadiyah. Keberadaan Muktamar PARMUSI semakin meriah dengan dihadiri 202 cabang dari seluruh Indonesia dan dibuka dengan didahului pemotongan pita oleh Prawoto Mangkusasmito. Prawoto adalah tokoh dari Masyumi menjabat sebagai Ketua Umum terakhir sebelum dibubarkan. Muktamar PARMUSI Seakan-akan menjadi arena syukuran hari ulang tahun ke-XXIII, 7 November 1945-1968 M, partai politik Islam Masyumi.<sup>40</sup>

Pada hari ke-2 Muktamar PARMUSI, tepatnya pada tanggal 4 November 1968 M telah hadir Brigjen. Ali Moertopo sebagai Operasi Khusus atau Opsus, Badan

---

<sup>38</sup>PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 221

<sup>39</sup>Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah Jilid 2*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2012), h. 491-492

<sup>40</sup>Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah Jilid 2*, h. 491-492

Rahasia di bawah langsung Jenderal Soeharto.<sup>41</sup> Sebagai utusan Presiden, Ali Moertopo pada bulan sebelumnya tanggal 31 Oktober 1968 M menyatakan mungkin pemerintah membolehkan untuk Anwar Harjono dan H. Hasan Basri berada dalam pimpinan PARMUSI. Akan tetapi, tokoh-tokoh yang muncul sebagai calon ketua terdiri dari dua kelompok di PARMUSI. *Pertama*, kelompok Mohammad Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Mohamad Roem. *Kedua*, kelompok Anwar Harjono, Hasan Basri, Sarif Usman. Akhirnya, tepat pada 5 November 1968 M, Selasa Paing, 13 Sya'ban 1388 H jam 11:29 secara aklamasi memilih Mr. Mohamad Roem sebagai Ketua Umum.<sup>42</sup> Ketua I s/d V adalah Anwar Harjono S.H, H. Hasan Basri, H. Djarnawi Hadikusumo dan Ir. Umar Tosin. Sekertaris Umum Drs. Hasbullah. Dibantu oleh sekertaris I dan II, Drs. Lukman Harun dan Mohamad Sulaiman. Selain itu, terdapat 17 anggota Dewan Pimpinan Pusat, antara lain Nj. Aisjah Amini S.H., Nj. Chadidjah Razak, Djamaludin Datuk Mangkuto S.H., Gusti Muis, AR. Baswedan, Ir. Mohammad Sanusi, Nj. Sunario Mangkusasmito, Maizir Amadin dan K.H. Misbah. Demikian yang diberitakan oleh *Pikiran Rakjat*, 17 Sya'ban 1388 H, Sabtu Manis, 9 November 1968 M.<sup>43</sup>

Dampak dari keputusan Mukhtamar PARMUSI atau PMI tersebut, kemudian muncul dalam surat kabar *Mimbar Demokrasi* menuliskan pernyataan Jendral Soeharto Presiden RI, pada tanggal 28 Oktober 1968 M antara lain.

---

<sup>41</sup>Hartono Mardjono, *Reformasi Politik Suatu Kecharusan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 26

<sup>42</sup>PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, h. 221

<sup>43</sup>Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah Jilid 2*, h. 492

*“Tokoh-tokoh Masyumi jangan sampai duduk dalam pimpinan PMI. Selagi saya berkuasa, saya tidak segan segan membekukan PMI”.*

Selain itu, *Pikiran Rakyat*, Pimpinan Sakti Alamsyah, 22 November 1968 M, Jum’at Wage, 1 Ramadhan 1388 H, mengangkat penegasan kembali Presiden Soeharto bahwa:

*“Amnesti terhadap perseorangan pimpinan Masyumi yang terlibat PRRI, tidak berarti pemerintah membenarkan upaya merehabilitasi partai politik Masyumi.”*

Dari pernyataan Presiden Soeharto tersebut artinya, pemerintah menolak hasil dari Mukhtar PARMUSI. Respon dari pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru sudah terlalu dalam mengurus dari kegiatan partai politik yang baru berdiri itu. yang Dipersoalkan oleh pemerintah itu bukan waktu Mukhtar, akan tetapi hasil dari Mukhtar itu sendiri. Dalam Mukhtar tersebut yang terpilih adalah Mohamad Roem sebagai Ketua Umum. Padahal sudah dikatakan pada tanggal 5 Februari 1968 M, pemerintah menegaskan sikapnya melarang para aktivis Masyumi memegang peran pimpinan dalam PARMUSI. Alasannya cukup tegas bahwa PARMUSI bukan rehabilitasi Masyumi.<sup>44</sup> Tokoh aktivis Masyumi hanya boleh bermain dibelakang partai bukan didepan. Hal inilah yang kemudian pemerintah menekan dan mengancam melalui telegram dan berita-berita nasional.

Dr. Mohammad Hatta dalam ceramahnya di Dewan Keluarga Masjid “Istiqomah” Jalan Taman Citarum Bandung, 21 Sya’ban 1388 H, Kamis Legi, 13 November 1968 M, dalam menjawab pertanyaan wartawan *Antara*, Dr. Mohammad

---

<sup>44</sup> PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, h. 221

Hatta Presiden Soeharto tidak benar apabila ikut campur tangan terhadap hasil Mukhtar PARMUSI. Pemerintah berdalih, justru tindakan pemerintah menolak hasil keputusan Mukhtar PARMUSI adalah sebagai upaya menegakkan demokrasi yang sehat dalam pelaksanaan, ditinjau dari keamanan dan ketertiban. Tanpa keduanya demokrasi yang sehat hanya jadi angan-angan.<sup>45</sup>

Pada perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1968 M, PARMUSI bersama NU berusaha agar Piagam Jakarta disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika dilihat secara historis, para pemimpin muslim di Indonesia telah berusaha menjadikan Islam sebagai dasar negara. Pertama kali pada waktu menjelang persiapan kemerdekaan 1945 dan kedua kalinya di Majelis Konstituante 1956-1958 M, tetapi kedua-duanya tidak berhasil. Sebenarnya tujuan mereka yang sebenarnya yaitu penerapan hukum Islam, bukan negara Islam dan karena itu, mereka menuntut Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 diberi status resmi. Oleh sebab itu, selama sidang MPRS Maret 1968 M, PARMUSI bersama dengan NU berusaha agar Piagam Jakarta disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Meski partai-partai Islam tersebut mendukung Piagam Jakarta, tetapi bentuk dukungan itu bervariasi. Allan Samson mengamati bahwa pada awal zaman Orde Baru ada tiga pandangan mendasar mengenai Piagam Jakarta yang dinyatakan oleh berbagai kelompok Islam yakni:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah Jilid 2*, h. 494

<sup>46</sup>Maskury Abdillah, *Islam dan Demokrasi: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 56

1. Pernyataan bahwa Piagam Jakarta “mengilhami” UUD 1945 dapat diterima tanpa berusaha mendefinisikan atau memodifikasi lagi. Dengan ini, isu ini sengaja dianggap ringan, mungkin untuk menghindari terulangnya perdebatan sengit. Dengan demikian, kepuasan simbolis harus diberikan sebagian dan bukan seluruhnya.
2. Piagam Jakarta harus dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945 (yang secara esensial akan berarti mengembalikan anak kalimat yang telah dihapus dari dokumen tersebut). Hal ini akan menjadi simbol kemenangan Islam di mana syari’ah akan diaakui secara resmi oleh negara.
3. Piagam Jakarta harus dijadikan sebagai bagian legislasi dalam pasal 29 UUD, sehingga memberikan kekuatan hukum bagi syari’ah dan menunjuk negara tanggung jawab untuk pelaksanaannya.

Pandangan yang kedua dan yang ketiga, yang menyatakan pengakuan negara dan kemungkinan pelaksanaannya atas hukum Islam. Namun para reformis Masyumi-PARMUSI kemudian disisihkan oleh para akomodasionis PARMUSI yang didukung oleh pemerintah. Berbicara pada seminar pada Juli, Ketua MPRS, Jenderal Nasution, misalnya, menolak ide pendirian negara Islam, tetapi dia menyetujui tuntutan umat Islam untuk mengesahkan Piagam Jakarta. Hal ini di kemudian hari memperbolehkan komunitas Agama untuk sepenuhnya hidup sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma agama masing-masing.

Pada tahun 1971 M, pemerintah Orde Baru memenuhi hajatnya yaitu melakukan pemilihan umum yang pertama. Walaupun Soeharto belum secara resmi

menjadi Presiden Republik Indonesia, akan tetapi pengaruhnya cukup besar dalam menentukan pemilu 1971 M. Pemilihan umum ini diikuti oleh 10 partai politik antara lain: Partai Katolik, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Golongan Karya (GOLKAR), Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA), Partani Nasional Indonesia (PNI), Persatuan Tarbiah Islamiah (PERTI) dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Perolehan suara yang didapat secara keseluruhan telah diraih oleh GOLKAR sebagai partai pemenang. GOLKAR adalah Organisasi masyarakat yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Kemenangan GOLKAR membawa Soeharto lebih kuat dalam memimpin Indonesia. Sehingga Soeharto lebih mampu menerapkan Kediktatoran menjelang kekuasaanya.

Adapun jumlah suara dan jumlah kursi yang didapat oleh peserta pemilu tahun 1971 M sebagai berikut:

No	Partai	Suara	%	Kursi DPR
1	GOLKAR	34,348,673	62,82	236 Kursi
2	Nahdatul Ulama	10,213,650	18,68	58 Kursi
3	Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI)	2,930,746	5,36	24 Kursi
4	Partani Nasional Indonesia (PNI)	3,793,266	6,93	20 Kursi
5	PSII	1.308.237	2,39	10 Kursi



6	Partai Kristen Indonesia (PERKINDO)	733,359	1,34	7 Kursi
7	KATOLIK	603.740	1,10	3 Kursi
8	PERTI	381.309	0,69	2 Kursi
9	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338.403	0,61	Kursi
10	Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA)	48,126	0,08	Kursi

Jumlah: 54.669.509 100,00 360<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup><http://kpu-malukuprov.go.id/pemilu-1971/> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 20:23 WIB.